

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA
BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

Rony Argha Niondo Manurung

41151010160090

Program kekhususan kepidanaan

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2020

***ENFORCEMENT OF EARTHQUAKE DISASTER FUND CORRUPTION IS
LINKED TO LAW NO. 20 OF 2001 ON CHANGES TO LAW NO. 31 OF 1999 ON
ERADICATING CORRUPTION CRIMES***

By:

Rony Argha Niondo Manurung

41151010160090

Criminal specificity program

Thesis

***Submitted To Meet One of the Exam Requirements to Obtain A Law Degree in
Law Study Program***



***FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rony Argha Niondo Manurung

NPM : 41151010160090

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bencana
Gempa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Rony Argha Niondo Manurung

41151010160090

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulisan ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bencana Gempa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dana bencana gempa dan Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi dana bencana gempa.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis normative dengan deskriptif analisis dengan mengkaji objek penelitian berdasarkan asas hukum, perundang-undangan ditinjau dari undang-undang yang mengaturnya, dengan jalan menelaah aturan-aturan hukum menurut studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa majelis hakim terlalu ringan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Muhir, terdakwa dipidana penjara 4 tahun, semestinya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanksi pada pada M. Muhir adalah Hukuman mati, karena dalam kasus ini terdakwa telah terbukti korupsi uang bantuan bencana atau musibah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang, ancaman hukuman mati ditujukan kepada pelaku tipikor atau tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 2 ayat 1, dimana ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional. Menerapkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan dalam pemidanaan tersangka korupsi, dapat membantu meminimalisir kasus korupsi yang ada di Indonesia dan juga meningkatkan perekonomian negara.

Kata kunci: pemberatan hukuman, dana bantuan bencana gempa.

Abstract

ENFORCEMENT OF EARTHQUAKE DISASTER FUND CORRUPTION IS LINKED TO LAW NO. 20 OF 2001 ON CHANGES TO LAW NO. 31 OF 1999 ON ERADICATING CORRUPTION CRIMES

This writing is titled Law Enforcement Against Earthquake Disaster Fund Corruption Actors Linked To Law No. 20/2001 on Changes to Law No. 31/1999 on Eradicating Corruption Crimes. This research aims to examine how law enforcement against the perpetrators of earthquake disaster fund corruption and in addition this research also aims to find out what factors prevent the death penalty from applying to the perpetrators of earthquake disaster fund corruption.

This writing uses research methods in the form of normative juridical approaches with descriptive analysis by examining research objects based on legal principles, legislation is reviewed from the laws governing it, by studying the rules of law according to literature studies sourced from various literature materials.

The result of this study is that the panel of judges is too light in imposing a criminal against defendant M. Muhir, the defendant is sentenced to 4 years in prison, should the panel of judges impose a verdict on a sanction on M. Muhir is the Death Penalty, because in this case the defendant has been convicted of corruption of disaster relief money or calamity as stipulated in Law No. 20 of 2001 on changes to Law No. 31 of 1999 On the Eradication of Corruption Crimes. In the Law, the threat of the death penalty is directed at the perpetrators of tipikor or corruption crimes that violate article 2 paragraph 1, where paragraph 2 of the article stipulates the threat of the death penalty is only dropped if the state is in danger, there is a national natural disaster. Implementing article 2 paragraphs 1 and 2 of Law No. 20 of 2001 on changes to Law No. 31 of 1999 on eradicating corruption crimes as a reference in the funding of corruption suspects, can help minimize corruption cases in Indonesia and also improve the country's economy.

Keywords: *penalty reinforcement, earthquake disaster relief fund.*

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan Puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Oleh karena Anugerah-Nya yang Melimpah, Kemurahan dan Kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penuli mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Dosen Penguji.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Inda Nurdahniar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali.
10. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. dan Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Ketua Sidang.
11. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Untuk teman-teman di Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Langlangbuana, terima kasih karena kita pernah belajar dan bertumbuh

bersama dalam persaudaraan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orangtua dan kakak tercinta Penulis Ayahanda Sumahap Manurung, Ibunda tercinta Kasnah Sirait dan kakak saya satu-satunya Desy Meita sari Naully Manurung, serta kerabat terdekat saya yang telah membantu dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan biarlah kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca.

Terima kasih.

Bandung, september 2020

penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka pemikiran.....	9
F. Metode penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah dan pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Korupsi.....	22
C. Pengertian Penegakan Hukum	35
D. Penegertian Pemberatan Hukuman	42
E. Rehabilitasi Pascabencana	44
F. Bencana Alam Nasional.....	46
G. Dana Bantuan Bencana Gempa.....	48
H. Bantuan sosial	54

BAB III BEBERAPA KASUS KORUPSI DANA BENCANA GEMPA

DIWILAYAH HUKUM KOTA MATARAM

A. Contoh kasus korupsi Dana Bencana Gempa58

B. Contoh Kasus Korupsi Dana Bencana Gempa62

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BENCANA GEMPA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi Dana Bencana gempa?68

B. Apa Faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya hukuman pemberatan terhadap pelaku pelaku korupsi dana bencana gempa?.....74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan80

B. Saran81

DAFTAR PUSTAKA82

LAMPIRAN.....

RIWAYAT HIDUP84